

## ANALISIS OPTIMALISASI INOVASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SUMBAWA

M. Ramadhani<sup>1,2</sup>, Ahmad Zulfikri Taning<sup>2\*</sup>, dan Hanifa Sri Nuryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Badan Pendapatan Daerah Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>3</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

*Corresponding author:* az.taning@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Optimalisasi Inovasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan antara lain; 1. Menganalisis Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumbawa. 2. Mengetahui Inovasi untuk mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan *Deskriptif Kualitatif*. Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data. Informasi dari Responden yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjadi Objek wawancara terstruktur sebanyak 5 orang diantaranya dari Pejabat Struktural Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dan Masyarakat sebagai Wajib Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hasil Penelitian meliputi *Aspek Manajemen* diantaranya *Manajemen Perencanaan* diantaranya, *Sarana, Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Output SPPT PBB-P2* masih di rasakan *kurang baik* dan perlu di sempurnakan lagi. Dari *Aspek Manajemen Organisasi* meliputi *Struktur, Aparatur dan Kinerja* juga masih dirasakan *kurang baik* dan perlu dibenahi. Selanjutnya lagi *Aspek Manajemen Pelaksanaan* dari *SOP, Insentif dan Loyalitas* di rasa *cukup baik* untuk saat ini dan yang terakhir *Aspek Manajemen Pengawasan* diantaranya *Kualitas Pelayanan, Pendataan dan penetapan serta Penagihan dan Pemeriksaan* dirasakan sudah *cukup baik* dan terus dipertahankan. Kesimpulannya bahwa Inovasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan di Kabupaten Sumbawa guna Optimalnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2.

**Kata Kunci:** Analisis; Optimalisasi; Inovasi PBB-P2.

### ABSTRACT

*This research discusses the Optimization Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Innovations in Sumbawa Regency. This research aims include; 1. Analyzing the Optimization of Rural and Urban Land and Building Taxes in Sumbawa Regency. 2. Know innovations to optimize rural and urban land and building taxes in Sumbawa Regency. The research method used by the author in this research is the Qualitative Descriptive approach method. Qualitative Descriptive is a research method based on the philosophy of postpositivism used to research the conditions of natural objects where the researcher is the key instrument for data collection techniques. Information from respondents selected in this research to be the object of structured interviews was 5 people, including Structural Officials of the Regional Revenue Agency of Sumbawa Regency and the Community as Taxpayers of Rural and Urban Land and Building Tax. The research results include management aspects including planning management, including facilities, budget, human resources, services and output. SPPT PBB-P2 is still felt to be not good and needs to be improved further. From the aspect of organizational management including structure, apparatus and performance, it is still felt to be not good and needs to be improved. Furthermore, the Management Aspects of Implementation of SOPs, Incentives and Loyalty are felt to be quite good at the moment and finally the*

*Supervision Management Aspects including Service Quality, Data Collection and Determination as well as Billing and Inspection are felt to be quite good and continue to be maintained. The conclusion is that Rural and Urban Land and Building Tax Innovation needs to be carried out in Sumbawa Regency in order to Optimize Original Regional Income from the PBB-P2 sector.*

**Keywords:** Analysis; Optimization; PBB-P2 Innovation.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat (Adziem et al.,2018). Pajak juga merupakan iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari penerimaan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Maka dari itu pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan dipercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keistimewaan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).

Dengan kata lain Pembangunan yang kini yang sedang berlangsung sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak dan berbagai sektor. salah satu sektor tersebut yaitu sektor keuangan dan sektor pendanaan bagi pembiayaan pembangunan yang secara operasional tentang dalam Anggaran Pendapatan salah satu pendapatan daerah merupakan pajak. Pajak menurut Pasal 1 No 1 Undang- Undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pada tahun 2001 Indonesia sudah memasuki era baru dalam bentuk pemerintahan, yaitu era otonomi daerah. Menurut skenario yang diyakini sebagian besar masyarakat sekarang ini, saat itulah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 yang kemudian direvisi melalui UU 32 dan UU 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan lagi kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Pada era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan fakta dan permasalahan mengenai kontribusi pajak yang tidak memenuhi target yang direncanakan maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisa elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan merumuskan alternatif-alternatif kebijakan.

Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTB juga mengalami masalah yang sama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Adapun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa yaitu berasal dari beberapa sumber antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB-P2, dan Pajak BPHTB. Selain bersumber dari pajak daerah, pendapatan asli daerah juga dapat bersumber dari retribusi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak yang berpotensi saat ini seiring berkembangnya suatu daerah baik dari pembangunannya karena banyak Investor datang ke Kabupaten Sumbawa untuk menjalankan usaha maupun pesatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan berubahnya alih fungsi lahan dari pertanian dan perkebunan menjadi pemukiman.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diberikan tanggung jawab melaksanakan fungsi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa membantu pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan fungsi secara umum dalam melayani masyarakat dikarenakan penerimaan daerah dikelola untuk menunjang pembiayaan daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan berdasarkan azas otonomi dan juga pembantuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance sebagai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah maka perlunya informasi data yang jelas digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Maka setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah:

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan sub urusan pendapatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan pajak daerah lainnya, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan;
3. Pelaksanaan administrasi/penatausahaan badan; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah.

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa: "Terwujudnya Peningkatan Pendapatan daerah Melalui Tertib Administrasi dan Pelayanan Yang Lebih Baik Kepada Masyarakat". Sedangkan Misi dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa sendiri yaitu:

1. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektivitas pelayanan di Bidang Pendapatan.

2. Melakukan Pengawasan Terhadap sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.
3. Melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha meningkatkan pendapatan.

Untuk memperoleh visi dan misi agar terealisasi pelayanan kepada wajib pajak juga sangat pengaruh karena kalau pelayanannya baik tentu wajib pajak terdorong membayar dan target dapat tercapai.

Permasalahan yang masih menjadi hambatan optimalisasi pengelolaan khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah bentuk Geografis Kabupaten Sumbawa, Adapun konsekuensi dan masalah yang timbul diantaranya adalah Kurang Optimalnya Pendataan Objek Pajak dan Pemutahiran dari Objek tersebut karena untuk saat ini Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dan pendaftaran untuk Objek pajak yang dimilikinya secara mandiri, Kemudian tenkandalanya jarak yang mengakibatkan timbulnya biaya transportasi dan membutuhkan waktu perjalanan.

Pengurusan yang terpusat di Bapenda yang berada di Ibukota Kabupaten di Sumbawa Besar menjadi penyebab kurangnya partisipasi dan respon masyarakat dan pengurusan SPPT baik data baru maupun pemutahiran data dari Objek sebelumnya yang sudah terdata. Hal ini yang menyebabkan maraknya biro jasa atau percaloan yang menawarkan bantuan guna pengurusan ke Bapenda di Sumbawa Besar.

Adapun masalah lain adalah saat penyampaian SPPT PBB-P2 ke Wajib Pajak yang berdomisili tidak di desa atau kecamatan tempat terbitnya SPPT PBB-P2 sehingga mempersulit petugas untuk menyampaikan SPPT PBB-P2 tersebut ke Wajib Pajak.

Masalah lainnya juga kurangnya pemahaman untuk melakukan pendaftaran untuk Objek yang dikuasai guna mendapatkan SPPT PBB-P2 dan juga yang sudah memiliki SPPT PBB-P2 masih kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Kabupaten Sumbawa yang memiliki 24 Kecamatan dan 157 Kelurahan dan Desa. Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah yaitu 6.644 km.

## 2. METODOLOGI

### 2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa untuk meneliti Analisis Optimalisasi Inovasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumbawa.



**Gambar 1.** Gambar Lokasi Penelitian Peta Kab. Sumbawa pada Peta Nusa Tenggara Barat dan pada Peta Indonesia.

Proses Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, pengumpulan data penelitian dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan dan melakukan olah dokumentasi pada tempat dimana penelitian dilakukan.

## 2.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. HASIL

#### A. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kesimpulan Sementara tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu:

##### 1) Perencanaan (*Planning*) Optimalisasi PBB-P2

###### a. Sarana

Untuk sarana masih di rasakan kurang, di karenakan Bapenda Kabupaten Sumbawa belum memiliki kantor sendiri sehingga kurang Optimalnya PBB-P2 dalam proses pengelolaannya.

###### b. Anggaran

Untuk ketersediaan anggaran masih perlu ditambah lagi untuk Optimalnya PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

###### c. Sumber Daya Manusia

Aparatur yang menangani masih terbatas dalam jumlah dan kemampuan jadi harus ditambahkan guna tercapainya pengelolaan PBB-P2 secara optimal.

###### d. Pelayanan

Sedang berinovasi untuk membuka pelayanan di tiga wilayah terjauh dan rencana pengadaan kendaraan pelayanan keliling untuk mewujudkan pelayanan yang lebih optimal.

###### e. Output PBB-P2

Selalu belajar dari kekurangan dan kesalahan di tahun sebelumnya guna menemukan cara kerja yang tepat dan cepat guna tersedianya Output PBB-P2 yang lebih optimal.

##### 2) Pengorganisasian (*Organizing*) Optimalisasi PBB-P2

###### a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi untuk pelayanan perlu di tambahkan melalui Pelayanan tambahan di tiga wilayah terjauh yaitu wilayah terjauh timur, wilayah terjauh Selatan dan wilayah terjauh barat beserta pejabat struktural beserta staf yang bertanggung jawab dengan wilayah kerjanya masing-masing.

###### b. Aparatur

Aparatur yang menangani PBB-P2 perlu di tambahkan lagi dalam jumlah dan perlu di tingkatkan pengetahuannya tentang PBB-P2 agar menunjang kemampuan dalam bekerja.

###### c. Kinerja

Kinerja perlu ditingkatkan dengan pemenuhan baik sarana prasarana, penambahan aparatur yang terlatih dan menambah kesejahteraan aparatur.

##### 3) Pelaksanaan (*Implementasi*) Optimalisasi PBB-P2

- a. SOP
 

Sistem Operasional Prosedural yang di gunakan sudah cukup baik dan terus di sempurnakan dengan belajar dari proses yang sedang dilalui, sehingga akan terbentuk SOP yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
  - b. Insentif
 

Pemberian Insentif sudah cukup baik dan dapat mensejahterakan aparatur, dan juga insentif tersebut bisa menjadi penyemangat untuk mengejar target capaian.
  - c. Loyalitas
 

Walaupun dengan kondisi jumlah aparatur terbatas, pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparatur yang ada sudah cukup baik karena selalu patuh terhadap perintah atasan dalam melaksanakan tugas.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) Optimalisasi PBB-P2
- a. Kualitas Pelayanan
 

Pelayanan dinilai cukup baik, walau keterbatasan aparatur yang menerima pendaftaran di kantor karena harus berbagi tugas dengan aparatur yang melakukan pendataan dilapangan, namun untuk saat ini bisa terselesaikan walaupun waktu pengerjaan akan memakan waktu dalam pelayanan mengingat antrian yang cukup Panjang.
  - b. Kualitas Pendataan Dan Penetapan
 

Pendataan dan Penetapan sudah dinilai cukup baik, karena walau dengan keterbatasan aparatur yang melakukan pendataan di lapangan dan aparatur yang melakukan penetapan di Kantor Bapenda kegiatan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat dibayangkan apabila aparatur telah di tambahkan maka hasil pendataan dan penetapan tersebut akan lebih maksimal dan lebih baik dari sebelumnya.
  - c. Kualitas Penagihan Dan Pemeriksaan
 

Penagihan dan Pemeriksaan sudah dirasakan cukup baik, karena telah dilihat dari realisasi pembayaran yang disetorkan dan juga selesainya masalah dalam rekonsiliasi jumlah setoran dari petugas pajak di desa dan kecamatan serta terselesaikannya masalah dari wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pengenaan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

## **B. Inovasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).**

Kesimpulan Sementara tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berkaitan dengan Inovasi menggunakan Aspek Manajemen (Sukarna,2011: 10) meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*) Inovasi PBB-P2
  - a. Sarana
 

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.
  - b. Anggaran
 

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.
  - c. Sumber Daya Manusia
 

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.
  - d. Pelayanan
 

Sedang berinovasi untuk membuka pelayanan di tiga wilayah terjauh dan rencana pengadaan kendaraan pelayanan keliling untuk mewujudkan pelayanan yang lebih optimal.
  - e. Output PBB-P2
 

Selalu belajar dari kekurangan dan kesalahan di tahun sebelumnya guna menemukan inovasi kerja yang tepat guna tersedianya Output PBB-P2 yang lebih baik.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) Inovasi PBB-P2
  - a. Struktur Organisasi
 

Struktur Organisasi untuk pelayanan perlu di tambahkan melalui Pelayanan tambahan di tiga wilayah terjauh yaitu wilayah terjauh timur, wilayah terjauh Selatan dan wilayah terjauh barat

beserta pejabat struktural beserta staf yang bertanggung jawab dengan wilayah kerjanya masing-masing.

b. Aparatur

Aparatur yang menangani PBB-P2 perlu di tambahkan lagi dalam jumlah dan perlu di tingkatkan pengetahuannya tentang PBB-P2 agar menunjang kemampuan dalam bekerja.

c. Kinerja

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.

3) Pelaksanaan (*Implementasi*) Inovasi PBB-P2

a. SOP

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.

b. Insentif

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.

c. Loyalitas

Tidak ada kesimpulan tentang inovasi.

4) Pengawasan (*Controlling*) Inovasi PBB-P2

a. Kualitas Pelayanan

Pelayanan dinilai cukup baik, walau keterbatasan aparatur yang menerima pendaftaran di kantor karena harus berbagi pekerjaan dengan aparatur yang melakukan pendataan dilapangan, namun untuk saat ini bisa terselesaikan walaupun waktu pengerjaan akan memakan waktu dalam pelayanan mengingat antrian yang cukup panjang, setelah inovasi pelayanan di tiga wilayah terjauh dibuka, maka pekerjaan tersebut akan terbantu dan tidak terpusat di Kantor Bapenda.

b. Kualitas Pendataan dan Penetapan

Pendataan dan Penetapan sudah dinilai cukup baik, karena walau dengan keterbatasan aparatur yang melakukan pendataan di lapangan dan aparatur yang melakukan penetapan di Kantor Bapenda kegiatan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat dibayangkan apabila aparatur telah di tambahkan maka hasil pendataan dan penetapan tersebut akan lebih maksimal dan lebih baik dari sebelumnya.

c. Kualitas Penagihan dan Pemeriksaan

Penagihan dan Pemeriksaan sudah dirasakan cukup baik, karena telah dilihat dari realisasi pembayaran yang disetorkan dan juga selesainya masalah dalam rekonsiliasi jumlah setoran dari petugas pajak di desa dan kecamatan serta terselesaikannya masalah dari wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pengenaan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

### 3.2. PEMBAHASAN

#### A. OPTIMALISASI

Optimalisasi adalah seni membuat sesuatu menjadi sebaik mungkin (Robert L. Ashenurst, 1996) dan Optimalisasi juga diartikan sebagai Suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan (Mahfud Sidik, 2001). Peneliti mencoba memaparkan bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Kabupaten Sumbawa, lalu membahas dengan mengelompokkan berdasarkan aspek manajemen sebagai berikut:

Aspek Manajemen Perencanaan diantaranya, terkait dengan Sarana sebagai sesuatu yang harus ada dan apabila kurang memadai maka akan menyebabkan tidak optimalnya dalam pengelolaan PBB-P2, jadi Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera membuat kantor yang representatif untuk Badan Pendapatan Daerah, kemudian Anggaran merupakan hal penting guna mengoptimalkan PBB-P2 dikarenakan suatu pekerjaan tidak akan bisa dilakukan tanpa ditunjang keuangan yang memadai baik untuk pengadaan sarana prasarana, biaya oprasional maupun biaya penunjang PBB-P2 lainnya, kemudian Sumber Daya Manusia merupakan hal paling penting, Pelayanan dirasakan masih jauh dari jangkauan masyarakat khususnya yang berada di tiga wilayah terjauh, dan yang terakhir mengenai Output SPPT PBB-P2 masih di rasakan kurang baik dan perlu di sempurnakan lagi.

Aspek Organisasi meliputi Struktur organisasi harus segera di perluas, kemudian penambahan aparatur, Kinerja juga masih dirasakan kurang baik dan perlu dibenahi dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang PBB-P2 tersebut dan juga di butuhkan aparatur yang handal dan menguasai PBB-P2 guna optimalnya PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

Aspek Pelaksanaan dari SOP sudah cukup baik dan akan terus dievaluasi seiring waktu dan keperluan jaman, kemudian insentif harus diusahakan untuk diperoleh dengan meningkatkan realisasi dan meminimalisir masalah PBB-P2 dan juga Loyalitas di rasa cukup baik untuk saat ini dan harus di tingkatkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya agar PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa dapat lebih Optimal.

Aspek Pengawasan diantaranya Kualitas Pelayanan harus terus ditingkatkan guna tercapainya pelayanan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, kemudian Pendataan dan penetapan perlu ditingkatkan lagi dengan penambahan aparatur serta Penagihan dan Pemeriksaan harus terus di tingkatkan walau dirasakan sudah cukup baik namun harus lebih ditingkatkan dan terus dipertahankan guna optimalnya pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

## **B. INOVASI**

Inovasi adalah melakukan sesuatu yang sudah ada, atau melakukan sesuatu yang sudah ada dengan cara yang baru (Joseph Schumpeter, 1942) dan juga Inovasi terjadi ketika sesuatu yang sudah ada diubah menjadi sesuatu yang lebih baik atau lebih efisien (Theodore Levitt, 1960). Peneliti mencoba memaparkan bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Kabupaten Sumbawa, lalu membahas dengan mengelompokkan berdasarkan aspek manajemen sebagai berikut:

Aspek Manajemen Perencanaan diantaranya, terkait dengan Sarana sebagai sesuatu yang harus ada dan apabila kurang memadai maka akan menyebabkan tidak optimalnya dalam pengelolaan PBB-P2, untuk di kecamatan dipersiapkan sarana dan prasarana guna inovasi layanan tambahan di tiga wilayah terjauh, kemudian Anggaran merupakan hal penting guna inovasi PBB-P2 dikarenakan suatu inovasi tidak akan bisa dilakukan tanpa ditunjang keuangan yang memadai baik untuk pengadaan sarana prasarana, biaya oprasional maupun biaya penunjang PBB-P2 lainnya, kemudian Sumber Daya Manusia merupakan hal paling penting, dikarenakan tidak akan maksimal pelaksanaan PBB-P2 apabila tidak ditangani oleh ahlinya walaupun sarana dan prasarana memadai dan anggaran mencukupi tidak akan berhasil dilakukan dengan optimal, Pelayanan dirasakan masih jauh dari jangkauan masyarakat khususnya yang berada di tiga wilayah terjauh dan perlu segera berinovasi di buka pelayanan tambahan di tiga wilayah terjauh dan menyediakan pelayanan menggunakan Mobil Pelayanan keliling yang sekalian bisa digunakan untuk permintaan pendampingan kegiatan penagihan di desa sesuai jadwal yang di tentukan oleh kecamatan, wajib pajak tidak perlu melakukan pendaftaran di Kantor Bapenda di Sumbawa Besar hanya cukup dengan datang ke kantor kecamatan atau melalui mobil pelayanan keliling sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditentukan di kecamatan masing-masing dan yang terakhir mengenai Output SPPT PBB-P2 masih di rasakan kurang baik dan perlu di sempurnakan lagi terutama dengan ketersediaan ruangan kerja yang nyaman dan lengkap dengan kebutuhan kegiatan tersebut serta penyimpanan berkas PBB-P2 maupun arsip Bapenda harus steril dari hujan dan hama tikus.

Aspek Organisasi meliputi Struktur organisasi harus segera di perluas dengan berinovasi menambah pelayanan tambahan dan menempatkan pejabat struktural beserta staf yang akan menangani pelayanan dan pendataan PBB-P2 di wilayah masing-masing, kemudian penambahan aparatur dan pelatihan di bidang PBB-P2 perlu segera dilakukan mengingat terbatasnya aparatur dan pengetahuan yang dimiliki tentang PBB-P2 dan Kinerja juga perlu dibenahi pengetahuan tentang PBB-P2 tersebut dan juga di butuhkan aparatur yang handal dan menguasai PBB-P2.

Aspek Pelaksanaan dari SOP sudah cukup baik dan akan terus berinovasi serta dievaluasi seiring waktu dan keperluan jaman, kemudian insentif harus diusahakan untuk diperoleh dengan

berinovasi meningkatkan realisasi dan meminimalisir masalah PBB-P2 dan juga Loyalitas kepada pekerjaan dan atasan di rasa cukup baik untuk saat ini dan harus dipertahankan.

Aspek Pengawasan diantaranya Kualitas Pelayanan harus berinovasi terus guna tercapainya pelayanan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, kemudian Pendataan dan penetapan perlu ditingkatkan lagi dengan di tunjang pelayanan di tiga wilayah terjauh serta penambahan aparatur, selanjutnya Penagihan dan Pemeriksaan harus terus berinovasi walau dirasakan sudah cukup baik namun harus lebih maksimal lagi dengan bekerja cepat dan bekerja cerdas.

#### 4. KESIMPULAN

Pada bab sebelumnya Peneliti telah memperoleh hasil penelitian dan telah membahas mengenai bagaimana pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang di rencanakan dengan tujuan penegelolaan PBB-P2 yang lebih baik maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola dengan prinsip Aspek Manajemen yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan dan untuk Optimalnya PBB-P2 dilakukan dengan pemenuhan beberapa hal yaitu:
  - a. Sarana Prasarana
  - b. Sumber Daya Manusia
  - c. Metode dan sitem kerja
  - d. Hasil dan capaian tujuan
2. Adapun beberapa Inovasi telah diterapkan diantaranya dengan Pelayanan yang menggunakan Aplikasi PBB-P2 yang berbasis Online, Loker pembayaran yang tersebar di masing-masing 24 Kecamatan maupun di layanan Bank Negara Indonesia, Sebagian inovasi tersebut masih dalam perencanaan diantaranya Pemetaan, Penyesuaian NJOP, Pelayanan Pengurusan di Wilayah Timur, Selatan dan Barat beserta penunjukan Pejabat Fungsional beserta Staf dan juga Sarana Prasarana dan kendaraan operasionalnya di lapangan serta Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling guna mempercepat realisasi pembayaran SPPT PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). *Analisis optimalisasi penerimaan pajak daerah pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten sinjai*. Universitas Muhammadiyah Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). *Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>.
- Akbar, Suryadi. (2021). *Evaluasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Pajak di Kota Jambi*. *Jurnal Tanah Pilih, Vol 1 No.1*.
- Amalia, Reski. (2019). *Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Mulawarman.
- Anoraga, Abieska et. all. (2019). *Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Melalui program Drive Thru (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Brawijaya.
- Baok, Rambu, Trio, Lita et. all. (2020). *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Batu*.

- Badan Pendapatan Kabupaten Sumbawa. (2022), *Pajak Daerah*. Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Dewi, R. K., & Firmansyah, R. (2019). *Analisis Kepuasan Pengguna Website Pajak Online Kota Bandung Menggunakan Model Evaluasi Terintegrasi*. Swabumi, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v7i1.5569>
- Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M. (2016), *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Elsye, R. (2022). *Implementasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB-P2) di kabupaten bandung provinsi jawa barat*. Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Effendi, F., Ratnawati, V., Basri, Y. M. (2021). *Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 04(02), 95–116.
- Enga, Anastasia, Graisa et. All. (2019). *Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Malalayang*. Universitas Sam Ratulangi.
- Erwin. (2018). *Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada upt pd parung bappenda kabupaten bogor*.
- Firdaus, C. M. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, R. D., Baharata, A. W., Saputro, R., Pratiwi, I. (2021). *Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kecamatan reban kabupaten batang*.
- Irianti, E. T. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Irianti, E. T. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Kautsar, M. Z. A., Abdal, Hidayat, A. (2022), *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang*.
- Kharisma, B. (2018). *Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung: Suatu Pendekatan Analytical Hierarchy Process*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 8, 1957–1996.
- Lestari, M. P., Maharani, F., Triani, M., Rukmi, M. P. (2021). *Optimalisasi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya*. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak.
- Lestari, M. P., Maharani, F., Triani, M., Rukmi, M. P. (2021). *Optimalisasi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya*. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak.